

LEGAL PROTECTION FOR SHAREHOLDERS FOR UNILATED TRANSFER OF SHARES CARRIED OUT BY THE BOARD OF DIRECTORS

Andreas Aldy Branyaga

Limited Liability Company Law

Contributor:

J.M. Atik Krustiyati

Fransisca Yanita Prawitasari

ABSTRACT

Development in the era of globalization has had a significant impact on the development of various fields, one of which is the economy. As a form of business entity that has a strategic role, Limited Liability Companies (PT) are regulated by law to maintain continuity and order. This research analyzes the legal aspects of delisting PT shares without going through a General Meeting of Shareholders (GMS) based on the PT Triocom case. This case involves alleged unlawful acts by related parties which resulted in the removal of shares without a legal mechanism. The research uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. The results of the analysis show that the deletion of shares without approval through the GMS is not in accordance with PT legal principles as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: Limited Liability Company, General Meeting of Shareholders, Delisting of Shares

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM ATAS
PENGALIHAN SAHAM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH
DIREKSI

Andreas Aldy Branyaga

Hukum Perseroan Terbatas

Pembimbing:

J.M. Atik Krustiyati

Fransisca Yanita Prawitasari

Pembangunan di era globalisasi membawa dampak signifikan pada perkembangan berbagai bidang, salah satunya adalah ekonomi. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran strategis, Perseroan Terbatas (PT) diatur oleh hukum untuk menjaga keberlangsungan dan keteraturannya. Penelitian ini menganalisis aspek hukum pengalihan saham PT tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kasus PT Triocom. Kasus ini melibatkan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak terkait yang berujung pada pengalihan saham tanpa mekanisme yang sah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalihan saham tanpa persetujuan melalui RUPS tidak sesuai dengan prinsip hukum PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Pengalihan Saham